

RENCANA AKSI - PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT Kpts
SEKRETARIS KPU No 1 TAHUN 2026 : 11 HLM KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI
PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

Abstrak : - tugas dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan dan Pengadaan barang Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Bagian 076 Pada KPU Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2026;
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota
Dasar Hukum : -. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
-. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
-. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

-. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

-. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.
 - Lam 11 Halaman